

TAJUK RENCANA

Memilih Waktu Pelantikan Kepala Daerah

KAPAN kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai pemenang ini dilantik? Pertanyaan bukan hanya di benak pemenang pilkada namun justru dari warga. Tentu karena rasa ingin melihat dan bangga ketika *jagonya*, idola atau pilihannya dilantik, begitu besar.

Hanya perlu dipahami, pemilihan umum termasuk pilkada di Indonesia yang merupakan salah satu perwujudan demokrasi, seringkali menghadirkan konflik dan sengketa. Sebaik apapun penyelenggaraan, selalu ada celah yang memungkinkan terjadi sengketa dari pelbagai pihak.

Sejarah mencatat, kendati relatif aman pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 yang dilaksanakan serentak, tetap menyisakan masalah. Data KPU menyebutkan bila total daerah yang mengikuti penyelenggaraan pilkada serentak 2024 sebanyak 37 provinsi dan 414 kabupaten dan 93 kota. Dari jumlah tersebut menurut Humas MKRI dalam laman Mahkamah Konstitusi (MK, 3/1) dilaporkan terdapat 310 perselisihan hasil Pilkada 2024. Terdiri dari 23 perkara gubernur-wakil gubernur, 49 perkara walikota-wakil walikota dan 237 lainnya merupakan perkara bupati-wakil bupati.

Berdasar pasal 2A Perpres No 80/2024 dijelaskan pelantikan gubernur/wakil gubernur dijadwalkan 27 hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil Rekapitulasi suara. Sedang pelantikan bupati/walikota, 30 hari sesudah penetapan. Ketentuan ini menyebut 7 Februari untuk pelantikan gubernur/wakil dan 10 Februari untuk pelantikan bupati/walikota.

Persoalan inilah yang memantik diskusi berkepanjangan mengenai kapan kepala daerah terpilih dilantik. Mengingat MK menghendaki pelantikan dilaksanakan serentak, menunggu selesainya sidang sengketa di MK yang direncanakan berakhir 13 Maret mendatang. Padahal berdasar data KPU yang mengacu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) milik MK, total ada 21 hasil pemilihan gubernur dan 275 hasil pemilihan bupati/walikota yang tidak diwarnai permohonan sengketa di MK.

Teknis kapan pelantikan inilah yang kemudian menjadi diskusi panjang. Mestinya, Kemendagri bersa-

ma KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Tapi DPR sedang dalam masa reses hingga 20 Januari mendatang. Kini pemerintah melalui Mensesneg, Menkohuk-HAM Imipas serta Mendagri terus berkoordinasi, mencari opsi terbaik : Apakah yang tidak bersengketa dilantik dulu atau tetap bersama menunggu MK menyelesaikan sengketa pada 13 Maret?

Menjadi persoalan karena Presiden ingin pada kepala daerah menjalani retret usai pelantikan kepala daerah, untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Retret merupakan salah satu cara Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan koordinasi dan kesatuan dalam era kepemimpinannya. (KR, 11/1).

Tanpa mengurangi rasa hormat proses persidangan sengketa di MK, perlu dipikirkan pentingnya kepala daerah segera bekerja untuk menjalankan program-program termasuk program dari pemerintah pusat. Terlebih untuk program prioritas nasional yang harus dilakukan segera. Contohnya, seperti Program Makan Siang Bergizi yang kepala daerah baru harus segera melihat cermat pelaksanaannya. Belum lagi tugas lain yang segera menghadang.

Bagi kepala daerah yang bersungguh-sungguh mengabdikan dan berjuang untuk rakyat, waktu sebulan – dilantik lebih dulu pada Februari – tentu sudah banyak yang dapat dilakukan. Sementara menunggu sisanya mengikuti proses persidangan MK hingga 13 Maret, dilantik periode kedua. Untuk retret, bisa dilaksanakan bersama setelah pelantikan periode kedua dilakukan.

Mungkin keputusan ini dapat menjadi *win-win solution*. Pengabdian kepala daerah terpilih untuk warganya dapat segera dilakukan. Dan koordinasi serta kesatuan dengan pemerintah pusat pun tetap dapat diikuti. Dengan kebijakan ini ada rasa menghormati pada rakyat daerah yang mampu menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Di sisi lain, tetap juga menghormati warga lain yang menuntut keadilan demokrasi. ☐f

OPINI

Maksimalkan SDM Saat Minus SDA

DAERAH Istimewa Yogyakarta memiliki empat kabupaten dan satu kota setingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Kota Yogyakarta. Empat kabupaten di DIY boleh dikatakan memiliki aset sumber daya alam (SDA) dan luasan wilayah yang cukup luas. Gunungkidul dengan luas wilayahnya 1.475,15 km2, Sleman: 573,75 km2, Kulonprogo 577,22 km2, Bantul 511,71 km2. Sementara kota Yogyakarta hanya memiliki luas 32,8 km≤ dan hampir bisa dikatakan tidak memiliki Sumber Daya Alam. Menurut Richard Florida, (2002) bagi wilayah yang minim SDA maka disarankan untuk menyikapi secara kreatif dalam optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan dikatakan kota-kota yang menumpukan investasi pada kreativitas dan inovasi SDM bahkan lebih cepat bertumbuh walupun minim SDA sekalipun.

Maka Walikota Yogyakarta terpilih dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) yang mumpuni dan memiliki segudang pengalaman baik sebagai Bupati Kulonprogo dan Kepala BKKBN, diyakini tidak risau akan minimnya SDA yang dimiliki wilayah yang akan dipimpinnya. Karena Hasto Wardoyo dikenal dengan tangan dinginnya pernah memimpin kabupaten dengan slogan Binangun dengan gerbrakannya, yakni Bela Beli Kulonprogo, ToMIRA dan lainnya. Namun demikian tidak ada kelirunya jika diberi sumbang pemikiran yang dapat digunakan menambah perbendaharaan strategi menghadapi minimnya SDA Kota Yogyakarta. Adapun hal-hal tersebut adalah diantaranya adalah:

Pertama, Pendekatan lokal. Kota Yogyakarta dengan segudang sebutannya memiliki beragam potensi, khususnya bidang pariwisata dan budaya. Maka mengoptimalisasi sektor pariwisata dan budaya merupakan sebuah keniscayaan. Berkreasi dan berinovasi pada pariwisata berbasis budaya seperti seni pertunjukan, seni rupa, seni kriya dan juga seni *broadcasting* dan perfilman. Sebagai kota pendidikan dapat melakukan penguatan

Akhir Lusono

collaboration event dengan stakeholder, yakni universitas, pemerintah, dan sektor swasta.

Kedua, Pendekatan regional. Perlunya kerjasama antardaerah kabupaten yang ada di DIY dengan pertukaran SDM dengan SDA. Agar ada sinergi yang *mutualisme*. Sehingga terjadi saling silang yang akan memoncerkan DIY di mancanegara. Kiranya dapat dicoba juga dengan menjadikan



KR-JOKO SANTOSO

Kota Yogyakarta sebagai pusat distribusi barang untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Ketiga, Pendekatan Nasional. Mempromosikan Kota Yogyakarta sebagai model nasional untuk kota berbasis pendidikan dan ekonomi kreatif. Mendorong Kota Yogyakarta sebagai pusat pelatihan SDM nasional untuk berbagai sektor seperti teknologi informasi, budaya, dan pelayanan publik. Juga diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat secara simultan serta meminta dukungan infrastruktur seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berfokus pada sektor jasa dan kreatif. Perlu juga adanya pemberdayaan UMKM dengan memberi insentif bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka secara nasional melalui *e-commerce* dan pameran.

MEMBINGKAI EKONOMI RAKYAT DALAM SUMBU FILOSOFIS YOGYAKARTA
 Optimalisasi Dana Keistimewaan dalam Mendukung UMKM

KAWASAN Malioboro telah menjadi pusat perekonomian dan ikon budaya Yogyakarta sejak lama. Sebagai bagian dari sumbu filosofis Yogyakarta, Malioboro tidak hanya merepresentasikan harmoni kosmologis, tetapi juga merupakan pusat interaksi ekonomi, sosial, dan budaya. Penataan ulang kawasan ini melalui relokasi pedagang kaki lima ke Teras Malioboro 1 dan 2 menunjukkan upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tanpa menghilangkan jati diri dan fungsi sosialnya.

Sebanyak 888 tenant kini berjualan di Teras Malioboro 1, dan sebagian lainnya menempati Teras Malioboro 2 yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta. Relokasi ini tidak sekadar penataan fisik, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemda DIY dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih modern, teratur, dan berkelanjutan. Dalam usaha mendukung UMKM, Balai Layanan Usaha Terpadu (BLUT) KUMKM DIY menginisiasi berbagai program pemberdayaan tenant. Sejak tahun 2022 hingga 2024, BLUT KUMKM DIY telah menyelenggarakan 35 angkatan pelatihan dengan total 1.044 peserta. Program ini didanai oleh Dana Keistimewaan DIY (danaais). Dana tersebut diarahkan secara strategis untuk memberikan pelatihan berbasis enam aspek prioritas pembinaan dalam kerangka SiBakul Jogja, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, produktivitas, digital marketing, pasar dan pemasaran, serta keuangan atau manajemen. Langkah ini tidak hanya membekali para tenant dengan keterampilan baru, tetapi juga memastikan mereka mampu bersaing di era digital. Sebagai contoh nyata, pelatihan “Mentoring Bisnis Aspek Produksi” pada September 2024 mengajarkan tenant untuk meningkatkan efisiensi manajemen produksi dan mengenalkan praktik bisnis terbaik melalui studi tiru ke UKM yang telah sukses. Tidak hanya teoritis, pendekatan ini juga memberikan pengalaman langsung kepada para peserta untuk memahami cara membangun

Aribowo

usaha yang lebih profesional dan berdaya saing.

Inovasi penting lainnya adalah digitalisasi pembinaan melalui SiBakul Jogja, sebuah platform inovasi Dinas Koperasi dan UKM DIY yang mempermudah UMKM mengakses pendataan, pelatihan, dan pasar digital. Alhasil, UMKM tidak hanya mendapatkan pendampingan yang efektif, tetapi juga bisa memperluas jaringan bisnis mereka ke market yang lebih luas melalui SiBakul MarketHUB. Transformasi digital ini adalah langkah strategis untuk memodernisasi UMKM di DIY, sehingga mampu menjadi penggerak roda ekonomi yang tangguh.

Tidak dapat dipungkiri, kawasan Malioboro memiliki makna lebih dari sekadar pusat perbelanjaan. Sebagai bagian dari sumbu filosofis Yogyakarta, Malioboro merupakan ruang yang merepresentasikan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dengan dukungan Pemerintah Daerah DIY, kawasan ini tetap mempertahankan nilai filosofisnya sambil menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM. Para tenant di Teras Malioboro 1, dengan pelatihan dan pendampingan yang diberikan, kini memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam ekosistem bisnis modern. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan DIY tidak hanya dikelola dengan baik, tetapi juga memberikan dampak nyata pada masyarakat. Pemerintah Daerah DIY telah membuktikan komitmennya untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital, tenant di Teras Malioboro 1

Keempat, Pendekatan secara internasional. Secara kontinyu mengadakan festival budaya skala internasional yang mempromosikan seni, kuliner, dan tradisi lokal ke mancanegara, agar mereka bertanding ke kota Yogyakarta. Meningkatkan kerja sama dengan *platform* perjalanan internasional untuk memasarkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata. Menarik investasi internasional dengan memberikan insentif kepada investor asing yang ingin membuka usaha berbasis teknologi di Yogyakarta.

Membuka program keberlanjutan seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah sampah. Meningkatkan ekspor produk seni budaya baik itu batik, kerajinan tangan, makanan khas, dan pengiriman delegasi seni.

Semoga dengan memanfaatkan kelebihan sumber daya manusia yang ada di Kota Yogyakarta dengan menggairahkan sistem lingkungan yang mendukung kreativitas, pendidikan, seni, budaya dan ekonomi berkelanjutan, menjadi bara api yang tidak akan padam untuk Kota Yogyakarta yang menjadi ibukota DIY. Semoga strategi maksimalisasi kegiatan skala lokal, regional, nasional, dan internasional, dapat menjadi pilihan dan solusi mandiri yang menginspirasi bagi daerah lain. Minim SDA bukanlah halangan untuk berkarya dengan memaksimalkan SDM yang melimpah di kota Yogyakarta. Selamat berkerja Pak Hasto dan Pak Wawan untuk masyarakat kota Yogyakarta yang bermartabat. ☐f

*) **Dr Akhir Lusono SSn MM CHRMP MMSDM**, Anggota Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta: 2019 sd 2023 dan 2023 sd 2027.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019)

Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yurिया Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lumpito MPd.

Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Supiantoro, MM,CHE.

Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi.

Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid.

Redaktur: Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans.

Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana.

Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko.

Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandryk23@yahoo.com, iklandryk13@gmail.com.

Langanan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun)

Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com.

Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com.

Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529.

Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792.

Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244.

Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756.

Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738.

Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah.

Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.

Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -

W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.